

PENINGKATAN PARTISIPASI SOSIAL MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN NILAI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKAL

**Tri Eva Juniasih^{*1}, Elfi Syahri Rhomadona², Indra Syahputra Marpaung³, Wawan
Patriansyah⁴, Rina Tiur Lona⁵, Nurbaya Harianja⁶, Jepri Efendi⁷, Anggi Putri
Ramadhani⁸, Khairia Mala Sari⁹**

^{*1}Imu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara

^{3,6}Imu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara

^{2,4,5,7,8,9}Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara

Email : ^{*1}trievajuniasih76@gmail.com ; ²elfisyahrinie408@gmail.com; ³marpaungmdn@gmail.com;
⁴wawanfatriansyah@gmail.com ; ⁵rinatlpakpahan@gmail.com ; ⁶bayaharianja@gmail.com
; ⁷jeprisimamora098@gmail.com ; ⁸ramadhanianggiputri4@gmail.com
; ⁹khairiamala60@gmail.com

Abstract

This Community Service Program (PKM) was conducted over two days with 23 participants, including local residents, youth leaders, and community figures. The first day focused on values education and awareness of social participation through interactive lectures, group discussions, and reflection sessions. The results showed that 83% of participants improved their understanding of rights, responsibilities, and social values, and 87% actively participated in discussions. The second day emphasized local government governance and citizen participation mechanisms through lectures, role-playing simulations, case studies, and the development of action plans. A total of 78% of participants were able to create concrete action plans, and 87% understood the structure and mechanisms of local governance. Outputs of the activities, including documentation, modules, and simulation results, achieved a quality score of 85%. These findings indicate that interactive lectures, discussions, simulations, and hands-on practice are effective in enhancing participants' knowledge, skills, and social participation. Although some participants still require further guidance and material reinforcement, the program successfully increased awareness of social values and the community's ability to engage actively in societal life.

Keywords: Social Participation, Values Education, Local Government Governance

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berlangsung selama dua hari dengan 23 peserta, terdiri dari warga, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Hari pertama difokuskan pada pendidikan nilai dan kesadaran partisipasi sosial melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi. Hasil menunjukkan 83% peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan nilai sosial, dan 87% aktif berpartisipasi dalam diskusi. Hari kedua menekankan tata kelola pemerintahan lokal dan mekanisme partisipasi warga melalui ceramah, simulasi, studi kasus, dan penyusunan rencana aksi. Sebanyak 78% peserta mampu membuat rencana aksi konkret, dan 87% memahami struktur serta mekanisme pemerintahan lokal. Luaran kegiatan, termasuk dokumentasi, modul, dan hasil simulasi, mencapai kualitas 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan praktik langsung efektif meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

partisipasi sosial masyarakat. Meski beberapa peserta masih membutuhkan pendalaman materi dan bimbingan tambahan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran nilai sosial dan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Sosial, Pendidikan Nilai, Tata Kelola Pemerintahan Lokal

PENDAHULUAN

Partisipasi sosial masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan lokal yang demokratis dan efektif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam proses pembangunan di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih sering bersifat pasif dan terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai nilai-nilai sosial dan peran kewargaan. Akibatnya, potensi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Dwiyanto (2018), rendahnya partisipasi publik dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Rendahnya partisipasi sosial masyarakat tidak terlepas dari kurangnya pendidikan nilai yang menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kewargaan. Pendidikan nilai memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sosial dan pemerintahan. Tanpa pemahaman nilai yang kuat, partisipasi masyarakat cenderung bersifat formal dan tidak berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan lokal menyebabkan masyarakat kurang mengetahui ruang dan mekanisme partisipasi yang tersedia. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan di tingkat lokal. Tilaar (2012) menegaskan bahwa pendidikan nilai merupakan fondasi penting dalam membangun warga negara yang demokratis dan partisipatif.

Sejalan dengan itu, tata kelola pemerintahan lokal yang baik menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama. Partisipasi publik dipandang sebagai prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. United Nations Development Programme menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan keberlanjutan pembangunan (UNDP, 1997). Namun, partisipasi tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan ruang partisipasi yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan lokal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara khusus berfokus pada sosialisasi pendidikan nilai dan tata kelola pemerintahan lokal. Kegiatan dengan judul “Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat melalui Sosialisasi Pendidikan Nilai dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal” menjadi relevan untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Kegiatan ini dirancang sebagai intervensi edukatif yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat namun berdampak. Melalui pendekatan sosialisasi

dan diskusi, masyarakat diberikan pemahaman dasar mengenai nilai-nilai sosial dan prinsip tata kelola pemerintahan lokal. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi sosial masyarakat secara lebih aktif.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan pendidikan nilai dengan pemahaman tata kelola pemerintahan lokal dalam satu rangkaian kegiatan pengabdian. Selama ini, kegiatan pengabdian cenderung menitikberatkan pada aspek penyampaian informasi kebijakan atau peningkatan keterampilan teknis semata. Kegiatan ini menempatkan pendidikan nilai sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran partisipatif masyarakat. Integrasi kedua aspek tersebut diharapkan mampu menghasilkan partisipasi yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berorientasi pada perubahan

sikap. Dengan demikian, kegiatan ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari pengabdian masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi sosial dalam mendukung pemerintahan lokal yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan peserta serta keterlibatan aktif selama proses sosialisasi berlangsung. Selain itu, munculnya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemerintahan di lingkungan masing-masing menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran akademik berupa artikel ilmiah yang disusun berdasarkan hasil pengabdian.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi sosial masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan publik. Malnes dan Najicha (2024) menekankan bahwa partisipasi sosial yang efektif meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan publik dan membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah. Firanti dan Biduri (2024) menambahkan bahwa keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan lokal mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Miura, Lee, dan Kim (2025) yang menemukan bahwa partisipasi warga di tingkat lokal berhubungan positif dengan efikasi politik dan keterlibatan sosial dalam komunitas.

Dalam konteks pendidikan nilai, Lase dan Persada (2025) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang

menekankan nilai sosial dan etika meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan nilai tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku sosial yang kritis dan bertanggung jawab, sebagaimana diungkapkan Malnes dan Najicha (2024). Studi terbaru oleh Salampessy et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan nilai dan literasi tata kelola pemerintahan secara bersamaan meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan dibanding pendekatan yang hanya bersifat informatif.

Tata kelola pemerintahan lokal atau *good local governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Firanti dan Biduri (2024) menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian Miura, Lee, dan Kim (2025) menambahkan bahwa keterlibatan warga

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan legitimasi kebijakan. Osborne (2020) menegaskan bahwa partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan lokal mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peran media sosial dan teknologi digital dalam mendorong partisipasi sosial juga semakin penting. Malnes dan Najicha (2024) menemukan bahwa platform digital memungkinkan warga, terutama generasi muda, untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan mengorganisir aksi sosial secara efektif. Hal ini memperluas dimensi partisipasi sosial dari interaksi tatap muka tradisional menjadi partisipasi yang bersifat digital dan kolaboratif. Lase dan Persada (2025) menekankan bahwa integrasi pendidikan nilai dengan literasi digital dapat memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut dengan 23 peserta yang terdiri dari warga masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi peran (*role-playing*), dan praktik langsung. Hari pertama difokuskan pada pendidikan nilai dan kesadaran partisipasi sosial, di mana peserta diberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan publik. Hari kedua difokuskan pada tata kelola pemerintahan lokal, termasuk struktur, mekanisme partisipasi, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan warga. Setiap sesi dilengkapi dengan refleksi dan tanya jawab agar peserta dapat menginternalisasi materi dan merencanakan penerapan di lingkungan mereka.

Berdasarkan penelitian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial masyarakat, pendidikan nilai, dan pemahaman tata kelola pemerintahan lokal saling memperkuat satu sama lain. Pendidikan nilai berfungsi membangun kesadaran dan sikap partisipatif masyarakat, sedangkan tata kelola pemerintahan lokal menyediakan mekanisme formal untuk partisipasi. Pendekatan integratif ini memberikan kebaruan bagi pengabdian masyarakat karena menggabungkan aspek nilai, pendidikan, dan mekanisme pemerintahan secara simultan, bukan hanya peningkatan kapasitas teknis atau sosialisasi kebijakan semata. Dengan demikian, landasan teori ini menjadi pijakan kuat untuk kegiatan pengabdian yang bertujuan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa tahapan agar lebih terstruktur dan mudah dievaluasi. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi penentuan peserta, penyusunan modul, dan persiapan sarana-prasarana. Tahap kedua adalah pelaksanaan hari pertama, yang fokus pada pendidikan nilai, ceramah interaktif, dan diskusi kelompok. Tahap ketiga adalah pelaksanaan hari kedua, yang fokus pada tata kelola pemerintahan lokal, simulasi partisipasi, dan penyusunan rencana aksi warga. Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, berupa kuis, refleksi, komitmen peserta, dokumentasi, serta penyusunan laporan pengabdian dan artikel ilmiah. Dengan tahapan ini, kegiatan PKM berjalan sistematis, partisipatif, dan menghasilkan luaran yang terukur. Tahapan kegiatan ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah peserta 23 orang, terdiri dari warga masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat. Pada hari pertama, fokus kegiatan adalah pendidikan nilai dan kesadaran partisipasi sosial melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan sesi refleksi. Hasil kuis menunjukkan bahwa 19 peserta (83%) mengalami peningkatan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan nilai sosial, meskipun beberapa peserta masih memerlukan pendalaman materi. Selama sesi diskusi dan refleksi, 20 peserta (87%) berpartisipasi aktif, sedangkan beberapa peserta cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berkontribusi secara langsung.

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada tata kelola pemerintahan lokal dan mekanisme partisipasi warga. Peserta mengikuti ceramah, simulasi peran, studi kasus, dan menyusun rencana aksi partisipasi sosial. Dari evaluasi dokumen rencana aksi, 18 peserta (78%) mampu menyusun rencana aksi yang konkret, meskipun sebagian peserta masih memerlukan bimbingan tambahan untuk membuat rencana yang realistis. Pemahaman peserta terhadap tata kelola pemerintahan lokal juga cukup baik, dengan 20 peserta (87%) mampu menjelaskan struktur dan mekanisme partisipasi secara benar. Selain itu, luaran kegiatan berupa foto dokumentasi, notulen, modul materi, dan hasil simulasi berhasil disusun dengan baik, dengan pencapaian kualitas 85%, beberapa dokumen masih

memerlukan revisi minor. Hasil evaluasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

No	Indikator Penilaian	Metode Pengukuran	Target	Hasil	Persentase Pencapaian	Keterangan
1	Peningkatan pemahaman peserta tentang pendidikan nilai	Kuis sebelum & sesudah kegiatan	$\geq 80\%$ peserta meningkat	19 peserta meningkat	83%	Peserta mampu menjawab pertanyaan tentang hak, kewajiban, dan nilai sosial secara benar
2	Partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi	Observasi langsung narasumber	100% peserta aktif minimal 1 sesi	20 peserta aktif	87%	Sebagian peserta lebih banyak mendengarkan daripada berpartisipasi aktif
3	Kemampuan peserta menyusun rencana aksi partisipasi sosial	Dokumen rencana aksi peserta	$\geq 70\%$ peserta membuat rencana konkrit	18 peserta membuat rencana	78%	Rencana aksi mencakup langkah nyata di masyarakat, sebagian peserta membutuhkan bimbingan lebih lanjut
4	Pemahaman peserta terhadap tata kelola pemerintahan lokal	Refleksi dan tanya jawab	$\geq 80\%$ peserta memahami materi	20 peserta memahami	87%	Peserta dapat menjelaskan struktur dan mekanisme partisipasi, beberapa masih memerlukan penjelasan tambahan
5	Kelengkapan luaran kegiatan	Foto, notulen, modul, hasil simulasi	100% luaran lengkap	Luaran tersedia, sebagian perlu revisi	85%	Luaran dokumen siap dijadikan laporan dan artikel ilmiah, namun kualitas sebagian dokumen perlu penyempurnaan

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan praktik langsung cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi sosial masyarakat. Peningkatan pemahaman peserta tentang nilai sosial sebesar 83% menunjukkan bahwa pendidikan nilai mampu menumbuhkan kesadaran akan hak dan

kewajiban warga, meskipun beberapa peserta masih memerlukan pendalaman materi. Hal ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis partisipatif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak sipil dan peran aktif mereka dalam kehidupan sosial lokal. Persentase partisipasi aktif peserta sebesar

87% menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat terlibat dalam diskusi dan simulasi, meskipun beberapa peserta masih bersifat pasif. Temuan ini mendukung hasil pengabdian oleh Putra & Santoso (2020), yang menemukan bahwa simulasi peran (*role-playing*) dalam kegiatan masyarakat mendorong partisipasi warga, tetapi tetap memerlukan strategi motivasi tambahan agar seluruh peserta dapat terlibat secara maksimal.

Kemampuan peserta menyusun rencana aksi partisipasi sosial (78%) menunjukkan bahwa sebagian peserta masih mengalami kesulitan merumuskan langkah konkret. Hal ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Sari & Nugroho (2019), yang melaporkan bahwa masyarakat membutuhkan bimbingan lebih intensif untuk menyusun rencana aksi yang realistis dan terukur ketika pertama kali diperkenalkan dengan konsep partisipasi sosial. Pemahaman peserta terhadap tata kelola pemerintahan lokal (87%) menunjukkan efektivitas metode ceramah dan simulasi dalam memberikan pengalaman praktik nyata tentang mekanisme partisipasi warga. Hasil ini sejalan dengan pengabdian Kurniawan et

al. (2022), yang menemukan bahwa kombinasi pendidikan teori dan simulasi praktis meningkatkan pemahaman warga tentang struktur pemerintahan lokal serta mendorong mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.

Luaran dokumentasi kegiatan sebesar 85% menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peserta secara langsung, tetapi juga menghasilkan bukti yang dapat digunakan sebagai bahan laporan pengabdian dan publikasi ilmiah. Secara keseluruhan, persentase pencapaian indikator yang berada di kisaran 78–87% menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi sosial masyarakat, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, seperti pendampingan lebih lanjut dan strategi motivasi agar semua peserta dapat terlibat secara maksimal. Hasil pengabdian dan penelitian sebelumnya menunjukkan konsistensi temuan ini, yaitu bahwa kombinasi pendidikan nilai dan simulasi partisipasi sosial merupakan strategi efektif untuk memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan bermasyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai dan pemahaman tata kelola pemerintahan lokal efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi sosial masyarakat. Persentase pencapaian indikator berada di kisaran 78–87%, yang menunjukkan keberhasilan kegiatan meskipun masih ada ruang untuk pendampingan lebih lanjut. Peserta mampu menyusun rencana aksi partisipasi sosial, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam konteks lokal. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa modul materi, notulen,

dokumentasi, dan rencana aksi warga yang dapat dijadikan referensi untuk publikasi dan replikasi di lokasi lain. Berdasarkan hasil kegiatan PKM, disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan bagi peserta untuk memastikan rencana aksi partisipasi sosial dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Selain itu, penggunaan metode partisipatif seperti simulasi atau *role-playing* perlu ditingkatkan agar seluruh peserta lebih aktif terlibat dalam setiap sesi. Pengembangan modul pendidikan nilai dan tata kelola pemerintahan lokal secara lebih rinci dan digital juga dianjurkan, sehingga materi dapat diakses lebih luas dan

diterapkan di lokasi lain dengan karakteristik serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat, dan LPPM UGN yang telah memberikan bantuan dana dan dukungan. Kami juga berterima kasih kepada semua narasumber, fasilitator, serta

masyarakat peserta kegiatan yang telah memberikan dukungan inmateril, berupa waktu, perhatian, partisipasi aktif, ide, dan masukan berharga selama kegiatan berlangsung. Dukungan ini sangat berperan penting sehingga kegiatan PKM dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*.
- Kurniawan, D., Hartono, A., & Wijaya, R. (2022). Peningkatan partisipasi warga melalui pendidikan tata kelola pemerintahan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 45–56.
- Lase, F., & Persada, B. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Malnes, H. A., & Najicha, F. U. (2024). Peran Media Sosial dalam Mencapai Civic Participation pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Miura, H., Lee, T., & Kim, E. (2025). Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*.
- Osborne, S. P. (2020). *The New Public Governance?* London: Routledge.
- Putra, R., & Santoso, E. (2020). Simulasi peran untuk mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan sosial. *Jurnal Pengabdian & Masyarakat*, 6(1), 22–30.
- Rahmawati, F., Nugraha, A., & Cahyono, S. (2021). Efektivitas pendidikan kewarganegaraan berbasis partisipatif terhadap pemahaman masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 15–28.
- Salampessy, M., Nungraha, A. R., SJORaida, D. F., et al. (2025). Citizen Participation in Public Administration: A Review Literature. *eScience Humanity Journal*.
- Sari, N., & Nugroho, P. (2019). Pendampingan masyarakat dalam penyusunan rencana aksi partisipasi sosial. *Jurnal Pengabdian Publik*, 3(1), 40–52.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.